

BAB III

PERKEMBANGAN GERAKAN MODERNISASI ISLAM DI INDONESIA DAN POLA GERAKAN HMI

A. Perkembangan Modernisasi Islam di Indonesia

Gerakan modernisasi yang berkembang di berbagai tempat khususnya di kawasan Timur Tengah telah memberikan pengaruh besar kepada gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Ide gerakan pembaharuan tersebut masuk ke Indonesia melalui berbagai saluran, antaranya lewat kontak para intelektual muslim Indonesia dengan intelektual muslim Timur Tengah, dan kontak jemaah haji Indonesia dengan jemaah luar.¹

Beragamnya corak pemikiran keagamaan yang berkembang dalam sejarah Islam di Indonesia—dari Islam yang bercorak sufistik, tradisional, revivalis dan modernis hingga neo-modernis—dengan jelas memperteguh kekayaan khazanah keIslaman negeri ini. Fenomena ini juga membuktikan beragamnya pengaruh yang masuk ke dalam wacana Islam yang berkembang di kepulauan Nusantara ini. Dalam perspektif sejarah perkembangan intelektual, hal itu tak pelak lagi, menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran visi dan orientasi di dalam corak pemahaman keagamaan di kalangan Muslim Indonesia.

¹ Murodi, M.A, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Semarang: Karya Toha Putra, tt), h. 195

Pola pergeseran tersebut, bisa dimulai dari penjelasan Martin van Bruinessen, seorang sarjana Belanda yang ahli dalam kajian Islam di Indonesia, bahwa pada masa-masa awal berkembangnya Islam di Nusantara sejak abad ke-13 M corak Islam yang berkembang adalah Islam yang bernuansa sufistik. Bentuk Islam yang seperti itu juga mempengaruhi para pemikir-pemikir Islam pada masa tersebut hingga setidaknya empat abad kemudian. Lebih tepatnya, ia memberikan penilaian seperti berikut ini:

“Wajah Islam di Indonesia beraneka ragam, dan cara kaum Muslim di negeri ini menghayati agama mereka bermacam-macam. Tetapi, ada satu segi yang sangat mencolok sepanjang sejarah kepulauan ini: untaian kalung mistik yang begitu kuat mengebat Islamnya! Tulisan-tulisan paling awal karya Muslim Indonesia bernapaskan semangat tasawuf...”.

Pada saat ditengarai munculnya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam, sebagai akibat dari hubungan kalangan terpelajar Nusantara dan Timur Tengah pada abad ke-17 dan 18 M, pengaruh pemikiran sufistik pada berbagai kalangan Muslim masih cukup kuat. Hal ini ditandai dengan masih berkembangnya berbagai ajaran kelompok tarekat dan sufi di Nusantara. Yang penting dicatat di sini adalah bahwa, untuk tujuan penelitian ini, pada masa-masa ini Islam cenderung masih lebih bermakna sebagai sesuatu yang dipeluk, diyakini, dan dijalankan meskipun jumlah orang yang mendalami Islam cukup banyak, sebagian di

antaranya bahkan di Timur Tengah. Maksudnya, pun jika Islam dipelajari, hal itu lebih sebagai sebuah upaya untuk “mempertebal” iman, dan “meningkatkan” kesalehan seseorang yang mempelajarinya, dengan ruang lingkup studi yang terkadang lebih spesifik dan pendekatan yang normatif sifatnya.

Sementara itu, menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20—ketika bangsa Indonesia, termasuk kalangan Muslim terpelajarnya berkenalan dengan ide-ide Barat secara lebih intensif—telah secara signifikan mempengaruhi cara pandang masyarakat Islam, terutama para cendekiawannya, untuk lebih memahami dan mereaktualisasikan ajaran-ajaran Islam ke dalam realitas sosial mereka, kemudian muncul pengaruh pemikiran Islam dari luar, khususnya negeri-negeri Arab, corak pemikiran Islam ini lebih cenderung puritan, sehingga terkadang juga disebut ortodoks. Tidaklah mengherankan, meskipun sudah berkenalan dengan gagasan-gagasan modernisme yang sekuler, masih ditemukan ide-ide puritan mengenai wawasan keagamaan dan kebangsaan yang secara ideologis mencita-citakan negara "Islam". Kecenderungan seperti ini cukup dominan mewarnai corak pemikiran keagamaan kalangan yang kemudian sering disebut sebagai Muslim modernis awal tersebut.

Bermula dari pembaharuan pemikiran dan pendidikan Islam di Minangkabau, yang disusul oleh pembaharuan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab di Indonesia yang ditandai dengan berdirinya organisasi Jami'atul Khair

(1905), organisasi ini pada dasarnya terbuka untuk semua golongan muslim, namun mayoritas anggotanya adalah orang-orang Arab.²

Munculnya organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam dan organisasi-organisasi yang didirikan kaum terpelajar menandakan tumbuhnya benih-benih nasionalisme dalam pengertian modern, yang dikemudian hari berperan aktif dalam perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia.

1. Bentuk-Bentuk Modernisasi Islam Di Indonesia

Pembaharuan dalam Islam atau gerakan modern Islam merupakan jawaban yang ditujukan terhadap krisis yang dihadapi umat Islam pada masanya. Kemunduran kerajaan Utsmani yang merupakan pemangku khalifah Islam setelah abad ke-17 M telah melahirkan kebangkitan Islam dikalangan warga Arab dipinggiran imperium Utsmani.

Gerakan pembaharuan ini akhirnya menyebar luas ke berbagai belahan dunia muslim, termasuk salah satunya ke Indonesia. Adapun bentuk-bentuk pembaharuan di Indonesia yaitu:

a. Gerakan Puritanisme

Gerakan ini pertama kali diprakarsai oleh Muhammad bin Abdul Wahhab di Nejd. Gerakan puritanisme ini masuk ke Indonesia melalui tiga orang yang baru pulang dari haji

² Ahmad Syaukani, *Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam, cet-2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 117

ditanah suci, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piobang. Mereka melakukan penentangan terhadap praktek kehidupan beragama masyarakat Minangkabau yang telah banyak terpengaruh oleh unsur-unsur takhayul, khurafat dan bid'ah.

Karena aktifitas mereka di anggap cukup membahayakan keberadaan kaum tua atau kaum adat, maka kaum tua meminta bantuan Belanda. Pada tahun 1821-1837 M terjadilah Perang Paderi.

Dalam pertempuran yang tak seimbang itu kaum ulama mengalami kekalahan. Kekalahan ulama dalam Perang Paderi dalam menghadapi Belanda tidaklah membuat patah semangat para tokoh pejuang pembaharu itu, tetapi gerakannya semakin hebat. Gerakan pembaharuan itu tidak lagi bersifat politik agama, tetapi di alihkan ke dalam gerakan pembaharuan pendidikan.

b. Gerakan Reformisme

Gerakan reformis adalah suatu gerakan pembaharuan yang dilakukan untuk kembali kepada dasar Islam yang asli. Kelompok ini berusaha menerapkan sistem ajaran Islam seperti yang ada pada zaman Nabi SAW.

c. Gerakan Radikalisme

Gerakan ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh para pembaharu Islam untuk membangkitkan kembali semangat masyarakat Islam, sehingga mereka akan menjadi

masyarakat yang maju. Namun sebelum itu, unsur-unsur yang terdapat dalam ajaran Islam yang tercemar oleh takhayul, bid'ah dan khurafat harus dibersihkan terlebih dahulu.

Dalam tatanan pelaksanaan pembaharuan seperti ini, biasanya cara yang ditempuh melalui bentuk-bentuk radikal yang tak jarang dengan menggunakan kekerasan. Pada umumnya, gerakan ini menentang kekuasaan Barat yang kafir.

d. Gerakan Neo-sufisme

Gerakan ini merupakan kelanjutan dari gerakan yang dilakukan para pembaharu dari kelompok tarekat atau tasawuf dengan mengambil bentuk baru. Bentuk baru itu adalah aktifisme.

Bentuk aktifisme dalam gerakan ini membuat masyarakat menjadi dinamis. Bahkan dengan gerakan ini masyarakat dapat mengembangkan diri tanpa banyak bergantung kepada uluran kelompok atau bangsa lain.

Di antara unsur aktifisme adalah jihad. Melalui kata kunci inilah umat Islam melakukan modernisasi, terutama menentang segala bentuk penjajahan dan keterbelakangan. Gerakan ini banyak mewarnai berbagai pemberontakan Islam di tanah air dalam masa-masa penjajahan, misalnya pemberontakan petani Banten pada tahun 1888 M.³

³ Opcit., Murodi, *Sejarah Kebudayaan Islam*,.. h. 196-198

2. Aspek-aspek Modernisasi Islam dalam Gerakan Mahasiswa di Indonesia

a. Mahasiswa Islam dalam Pergulatan Teologis

Sejak awal berdirinya, sebagian ormas mahasiswa Islam ada yang terlahir dari kelompok sosial keagamaan dengan identitas yang jelas. Misalnya saja IMM yang terang-terangan mengusung nama Muhammadiyah, dan PMII meski secara struktural independen, namun masih memiliki ikatan kultural yang erat dengan NU. Sedangkan ormas mahasiswa Islam yang lain, HMI Dipo, HMI MPO dan KAMMI, tidak secara jelas membawa identitas kelompok keagamaan tertentu, malah mereka cenderung menjadi kelompok keagamaan tersendiri. Dari sini kemudian berkembanglah corak wacana dan strategi perjuangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini muncul akibat beragamnya metode pendekatan teologis, sebagai basis ideologi yang mereka bangun.

Kebebasan berpikir yang telah menjadi kultur sehari-hari di dunia akademis, telah mengundang sebagian besar mahasiswa Islam untuk merumuskan kembali paradigma teologi yang telah ada. Hampir semua sepakat bahwa paradigma teologi umat Islam saat ini merupakan hasil formulasi ulama klasik. Meski mengalami pembaharuan beberapa kali, tapi tidak banyak perubahan mendasar dalam paradigma teologi itu. Terlebih lagi tuntutan perubahan

mengharuskan umat Islam menyusun kembali paradigma yang baru.

Pemikiran teologi dalam masyarakat Islam bersumber dari ajaran aqidah yang dijelaskan dalam Al Qur'an dengan inti kepercayaan pengesaan Tuhan (tauhid) dan pengakuan atas kerasulan Muhammmad (Muhammad Rasulullah). Pemikiran teologi tentang Allah merupakan sebuah keyakinan terhadap adanya realitas transedental yang tunggal dan menuntut adanya aplikasi ketaatan pada tataran aksi. Oleh karenanya wujud nyata dari perilaku dan kepribadian umat Islam merupakan cerminan yang tidak dapat dipisahkan dari landasan teologisnya.

Dalam melakukan telaah keagamaan, mahasiswa Islam mengadopsi beberapa pemikir-pemikir Islam kontemporer, baik tokoh pemikiran Islam di Indonesia seperti Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Nurcholish Madjid, Jalaluddin Rakhmat dan lainnya, sampai tokoh dunia Islam yang cukup berpengaruh saat ini, diantaranya Hassan Hanafi, Mohammad Arkoun, Yusuf Qardlawi, M. Abed Aljabiri, Fazlur Rahman dan masih banyak lagi. Ketajaman analisis dan disiplin dalam mempergunakan metode, membuat para tokoh tersebut dikagumi banyak kalangan mahasiswa Islam. Sampai kemudian pemikiran mereka menjadi referensi utama bagi gerakan mahasiswa Islam, bahkan tidak jarang dikritisi dan dianalisis secara mendalam.

Di Indonesia sendiri, Fachry Ali dan Bahtiar Effendy menyatakan tentang tipologi gerakan intelektualisme Islam neo-modernisme. Gerakan pemikiran neo-modernisme merupakan gerakan pemikiran Islam yang muncul di Indonesia sekitar tahun 1970-an. Gerakan ini lahir dari tradisi modernisme Islam yang terdahulu dan telah cukup mapan di Indonesia. Akan tetapi ia memakai pendekatan yang lebih khas dari sisi konsepsi maupun aplikasi ide-ide.

Nurcholish Madjid merupakan tokoh gerakan intelektual ini. Dengan cerdas ia memadukan cita-cita liberal dan progresif dengan keimanan yang saleh. Melalui konsep rasionalitas, Nurcholish Madjid, sapaan akrabnya, menyatakan arti pentingnya untuk menelusuri dan memahami pengetahuan manusia yang relatif dan terbatas. Hal ini menyangkut persoalan hubungan kedudukan antara agama dan akal yang telah lama menjadi bahan perdebatan para teolog sejak dulu. Karena pengetahuan manusia yang terbatas itulah maka kebenaran yang bersifat mutlak tidak dapat dicapai oleh manusia.

HMI Dipo telah menjadikan pemikiran neo-modernisme ini sebagai referensi utama bagi pemahaman teologinya. Lewat pemikiran-pemikiran Nurcholish Madjid yang juga mantan ketua PB HMI inilah konsep Islam Keindonesiaan ditawarkan oleh kader-kader HMI.

Lain halnya dengan PMII, ormas mahasiswa Islam ini lebih mengembangkan teologi yang lebih radikal bila dipandang oleh sebagian besar umat Islam pada umumnya. Pada mulanya PMII memakai doktrin teologi *Aswaja* (*ahlussunnah wal jama'ah*) sebagai doktrin resmi yang dipakai NU dan masyarakat Islam Indonesia pada umumnya. Doktrin teologi *Aswaja* lebih banyak berbicara mengenai takdir manusia yang telah ditentukan Allah, dan kedudukan manusia sebagai makhluk. Namun akhir-akhir ini tradisi kritik yang berkembang di PMII tidak hanya menggugat kemapanan (*status quo*) struktur sosial, ekonomi dan politik yang ada, tapi termasuk doktrin teologi *Aswaja*. PMII dengan berani menggulirkan perlunya pembacaan kembali konsep *Aswaja* tersebut.⁴

Ahmad Baso, salah seorang senior di PB PMII mengungkapkan suatu gagasan mengenai kritik wacana agama. Kritik agama Baso adalah Islam sebagai sistem kultur dan ideologi. Titik perhatiannya diarahkan pada kritik nalar atau cara-cara berpikir yang secara sistemik membentuk pola pikir penganutnya secara sadar maupun tidak sadar. Lebih lanjut Baso mencontohkan kebakuan tradisi pembaharuan dalam pemikiran tokoh-tokohnya, baik itu pada diri Nurcholish Madjid, Dawam Rahardjo, maupun

⁴ Nurul Huda, *PMII Kader Minoritas Progresif*, Suara Merdeka, 31/06/2001.

dalam pemikiran Abdurrahman Wahid. Makna “Islam Liberal” dalam pemikiran Nurcholish Madjid, hanya berhenti pada tingkat wacana. Gagasan tersebut tidak bisa diterjemahkan secara praksis dalam kehidupan umat di lapisan bawah.

Berbeda lagi dengan IMM, ormas mahasiswa Islam yang satu ini tidak bisa lepas begitu saja dari pengaruh kultur yang ada di Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan, tentu saja tidak bisa lepas dari agama sebagai landasan teologis dalam berpikir, bertindak dan berinovasi. Aspek teologis ini penting karena dari sinilah Muhammadiyah melancarkan purifikasi agama atau pemurnian tauhid dari segala bentuk praktek keagamaan yang berbau takhayul, bid’ah dan khurafat. Dengan langkah ini sebenarnya Muhammadiyah ingin melangkah ke arah praksis, yaitu memperbaharui pola pikir umat yang lebih “membumi”, tidak mistis dan metafisis semata.⁵

Pada konteks historis, dulu pemahaman teologis semacam ini sangat hidup dan dinamis di Muhammadiyah, sehingga seringkali “gebrakan kultural” yang dilakukan Muhammadiyah cukup mengesankan. Namun saat ini, citra Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan dan Islam modernis telah memberikan “kepuasan” tersendiri yang

⁵ Bahrus Surur, *Teologi Amal Saleh: Membongkar Logika Sosial Pada Nalar Kalam Muhammadiyah*, Jurnal INOVASI, No. 3 Th. X/2001.

secara tidak disadari telah “memanjakan” Muhammadiyah dalam kemapanan wacana keagamaannya. Azyumardi Azra⁶ mengkritik pemahaman keagamaan Muhammadiyah yang monolistik (salafiyah). Padahal kecenderungan keagamaan masyarakat semakin pluralistik. Menurut Azra, selama ini Ulama Muhammadiyah hanya dialokasikan di tempat periferal dan marginal, yaitu di Majelis Tarjih, yang hanya menekuni dan menjawab persoalan-persoalan teknis hukum Islam (fihiyyah) untuk merespons perkembangan modern. Kalaupun ada di kalangan Muhammadiyah yang kritis terhadap pemerintah, itu biasanya muncul dari kalangan santri intelektual. Jarang sekali yang dikenal sebagai Ulama melakukan fungsi kontrol.

Sedangkan di HMI MPO, sebagaimana telah sedikit disinggung di awal, ormas mahasiswa Islam ini mengalami pergeseran cukup drastis. Semula gerakan HMI MPO bersifat eksklusif, konsisten dengan keIslamannya, maka semua aktivitasnya harus diukur dengan parameter Islam. Namun akhir-akhir ini HMI MPO cenderung terbuka dan menyerahkan pemahaman teologis terhadap pluralitas anggotanya.

Dari penjelasan tersebut, terlihat tidak adanya keseragaman pemahanan teologis di HMI MPO. Tidak aneh

⁶ Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*, (Bandung: Mizan, 2000) h. 47.

jika ekspresi keagamaan dari masing-masing kader nampak berbeda. Ada kader yang sangat kental dengan nuansa religiusnya, tidak sedikit pula kader yang tampil lebih moderat, bahkan cenderung 'liar' dan semaunya sendiri. Pemandangan semacam ini mudah dijumpai pada kader-kader HMI MPO.

KAMMI yang dilahirkan oleh para aktivis Lembaga Dakwah Kampus memiliki corak pergerakan yang khas. Jaringan mereka sangat luas dan telah ada hampir diseluruh Perguruan Tinggi di Indonesia. Tidak mengherankan jika pada usia yang masih muda KAMMI di puji banyak kalangan sebagai ormas mahasiswa Islam tersolid saat ini. Kehadiran massa dalam jumlah besar di setiap aksinya, memperkuat daya tekan KAMMI dalam mendukung gerakan reformasi.

Pada tataran teologis KAMMI memiliki doktrin pemahaman yang cukup kuat bahwa Islam sebagai suatu sistem yang total (kaffah) merupakan solusi terbaik dalam menjawab tantangan kemanusiaan. Bagi KAMMI, Islam tidak hanya berbicara mengenai pribadi individu, tapi Islam juga mengatur juga tentang hubungan sosial. Karena itu kemenangan Islam dalam keyakinan KAMMI adalah suatu keniscayaan.⁷

⁷ Andi Rahmat dan Muhammad Najib, *Perlawanan dari Masjid Kampus*, (Surakarta: Purimedia, 2001), h. 189

Tradisi pendekatan wacana yang berkembang di KAMMI adalah upaya pencarian keabsahannya gerakannya melalui teks-teks suci. Hampir di setiap kali muncul wacana pemikiran KAMMI akan selalu diikuti sumber pembenarannya dari teks Al Qur'an dan Hadits. Pembacaan terhadap teks-teks suci tersebut telah memberikan semangat juang (ghiroh) tersendiri bagi KAMMI. Pada akhirnya, kontekstualisasi teks dengan realitas sosial sekarang mendorong KAMMI berkiprah lebih banyak di bidang pelayanan sosial, pendidikan politik, dan advokasi umat.

b. Ekspresi Politik Gerakan Mahasiswa Islam

Untuk mengetahui ekspresi atau sikap gerakan mahasiswa Islam terhadap kondisi sosial politik yang berlangsung, tidak bisa dilepaskan dari tesis Clifford Geertz tentang politik aliran. Aliran menurut Clifford Geertz⁸ ditandai oleh beberapa ciri. Pertama, aliran adalah suatu gerakan sosial yang kemudian mengalami kristalisasi menjadi pengelompokan politik. Kedua, walaupun suatu aliran didefinisikan secara ideologis, namun biasanya ia dijiwai oleh cita-cita moral yang lebih luas. Ketiga, walaupun mengalami kristalisasi menjadi suatu pengelompokan politik, sebuah aliran biasanya dikelilingi oleh sebuah organisasi sukarela yang terikat secara resmi

⁸ Ignas Kleden, *Rencana Monografi: Paham Kebudayaan Clifford Geertz*, (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 49.

maupun tidak resmi dengan pengelompokan politik yang menjadi pusatnya.

Tipologi Geertz ini kemudian dikembangkan oleh Herbeth Feith dan Lance Castle⁹ yang membagi pemikiran politik Indonesia waktu itu ke dalam lima golongan: marxisme, Sosialisme Demokrat, Nasionalisme Radikal, Islam (terdiri dari modernisme Islam dan tradisionalisme Islam) dan tradisionalisme Jawa. Tipologi ini kemudian berkembang tidak hanya pada wilayah kultural tetapi juga wilayah politik yaitu mempengaruhi afiliasi pemilih waktu itu.

Menurut Geertz, afiliasi pemilih juga berdasarkan pada pengelompokan budaya ini. Kelompok santri kebanyakan berafiliasi ke NU dan Masyumi, abangan sebagian ke PKI, priyayi lebih banyak berafiliasi ke PNI. Basis aliran ini kemudian berkembang menjadi ideologi politik aliran yaitu Islam, nasionalis, komunis dan sosialis meskipun kelompok terakhir jumlahnya sangat kecil. Pemilu pertama tahun 1955 membuktikan dari sekian banyak partai yang muncul, empat partai besar sebagai pemenang dan semuanya mengambli tipologi Geertz sebagai basis ideologi mereka yaitu nasionalis diwakili PNI, Islam dengan Masyumi dan NU, Komunis dengan PKI dan Sosialis dengan PSI.

⁹ Herbert Feith & Lance Castle, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 35

Perkembangan pemilu 1999 menunjukkan gejala yang hampir sama meskipun tidak seratus persen. Bahkan ada kecenderungan pada sebagian partai untuk menghidupkan fenomena politik tahun 1955. Ada sisi menarik dari dalam hal afiliasi politik yang sifatnya cenderung ideologis. Suara NU dan PNI tidak mungkin beralih ke partai- partai yang identik dengan Masyumi (PBB, PK atau PAN) sementara suara Masyumi juga tidak beralih ke partai-partai yang identik dengan NU, PNI atau PKI (PDI P, PKB dan PRD). Kecenderungan ideologis ini tidak lepas dari tubuh Islam yang terbagi dalam dua kutub: modernis dan tradisional. NU mewakili tradisional dan Masyumi mewakili kutub modernis.

Dua bentuk pemikiran ini selalu berbenturan dalam hampir semua hal termasuk dalam bidang syariah. Kutub tradisional mengental dalam organisasi Nahdlotul Ulama, sementara Kutub modernis diwakili organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri merupakan organisasi reformis yang kehadirannya dimaksudkan untuk menjernihkan keyakinan umat Islam dari berbagai bentuk takhyul, bid'ah dan khufarat. Bagi Muhammadiyah, keyakinan umat telah banyak terkontaminasi dngan masuknya praktik peribadatan yang berbau Hindhu-Budha-Jawa. Sementara kelahiran NU salah satu latar belakangnya adalah untuk menyelamatkan tradisi. Dalam hal ini, NU

merasa keyakinannya dalam menjalankan ibadah terusik dengan hadirnya Muhammadiyah. Dari sinilah muncul berbagai ketegangan dan bahkan konflik yang sampai sekarang ada.

Kondisi gerakan mahasiswa Islam saat ini juga terjebak dalam polarisasi dan fragmentasi yang tidak jauh berbeda dengan politik aliran Geertz, meski dalam beberapa hal mengalami beberapa metamorfose. Organisasi massa mahasiswa Islam lahir dengan dipayungi kelompok politik yang dominan waktu itu, atau sebagai underbow partai. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) lahir dari generasi muda NU (Nahdlatul Ulama), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) lahir dibidani kelompok Islam modernis Masyumi. Selanjutnya, IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) yang jelas berasal dari Muhammadiyah. Sementara, keberadaan KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) pada praktik politik selanjutnya juga tidak bisa dilepaskan dari PK (Partai Keadilan).

Pada tahap selanjutnya, polarisasi lebih tajam terlihat pada kalangan Islam modernis yang diwakili HMI Dipo, HMI MPO, IMM dan KAMMI dengan kalangan Islam tradisional yang diwakili PMII. Hal ini dapat dicermati lebih rinci terutama pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Beberapa waktu menjelang lengsernya Gus Dur dan pada awal-awal pemerintahan Megawati,

terdapat friksi antar ormas Islam yang lebih disebabkan karena alasan ideologis. Memang berkembang berbagai rumor di seputar pro dan kontra turunnya Gus Dur, seperti permasalahan kesehatan Gus Dur, kapabilitas managerial ataupun konstitusi. Namun apabila ditelisik mendalam, turunnya Gus Dur semata terjadi karena konflik ideologis yang sekian lama terpendam.

Meskipun naiknya Gus Dur dengan bantuan poros tengah yang terdiri dari PPP, PAN, PBB, PK, namun aspirasi dan kepentingan kelompok poros tengah relatif diabaikan. Apabila ditelusuri, tentu saja hal ini bukan hal yang baru. NU atau dalam hal ini PKB jelas tidak mungkin berafiliasi dengan kelompok modernis terutama poros tengah. NU lebih mudah bergandengan tangan dengan kalangan abangan seperti dengan PDI P.

Pada pemilu tahun 1999 tersebut, hanya ada persaingan antara tiga partai yaitu PPP, Golkar dan PDI P. Pada masa itu Cak Nut melontarkan statement yang menghebohkan, "*Islam Yes, Partai Islam No!*". Pernyataan tersebut didasarkan pada jumlah umat Islam yang secara kuantitas terus bertambah, namun tidak dibarengi dengan ketertarikan mereka dalam organisasi atau partai Islam sebagai tempat dan wadah menyalurkan ide-ide Islam.

Seketika saja setelah pidato tersebut, respon dari berbagai kalangan, terutama cendekiawan Muslim

mengemuka. Berbagai reaksi emosional bermunculan atas ide Nurcholish Madjid. Menurut Budhy Munawar, lebih dari seratus artikel di surat kabar yang memberi respon terhadap munculnya istilah baru, sekularisasi. Nurcholish Madjid kemudian dianggap sekuler, barat *oriented*, antek Yahudi dan lain-lain.¹⁰ Akibatnya menimbulkan pro dan kontra, karena PPP menjadi partai yang sangat dirugikan, dan PDI P merasa paling diuntungkan, maka dari itu pada Nurcholish Madjid mendapat penghargaan, setelah meninggal ia dimakamkan di pemakaman sipil.

Fenomena yang sama juga terjadi pada ormas mahasiswa Islam. PMII lebih mudah bekerja sama dengan kelompok kiri dibandingkan dengan ormas Islam lainnya. Hal seperti ini sering terjadi seperti pada waktu pro kontra penurunan Gus Dur. PMII bekerja sama dengan ormas kiri seperti PRD, PMKRI untuk mendukung atau pro Gus Dur tetap menjadi presiden. Sementara, kelompok yang kontra Gus Dur seperti HMI Dipo, HMI MPO, IMM, dan KAMMI secara serentak, bersama menuntut Gus Dur mundur. Hal senada juga diungkapkan oleh kelompok modernis yang lain seperti HMI Dipo, HMI MPO, dan IMM.

Pada dasarnya mereka sama-sama memiliki keyakinan bahwa kapasitas dan kapabilitas Megawati diragukan.

¹⁰ Budhy Munawar Rahman, *Membaca Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 2008), h. 23.

Sedangkan alasan lainnya adalah asumsi yang selama ini terbukti bahwa kekuasaan itu cenderung korup, sebagaimana adagium Lord Acton. Sebagai organisasi yang independen, ormas Islam modernis lebih menitikberatkan perjuangannya pada kepentingan rakyat karena selama ini rakyat selalu berada dalam posisi yang tertindas padahal dalam konteks demokrasi, mereka adalah pemegang kekuasaan tertinggi.

3. Ide-ide Modernisasi Islam

a. Gagasan Nurcholish Madjid

Sebagai seorang cendekiawan muslim terkemuka di Indonesia, Nurcholish Madjid banyak memberikan formulasi pemikirannya terhadap dunia Islam yang bersifat pembaruan. Dengan berkiblat kepada pemikiran Ibnu Taimiyah dan Fazlur Rahman sebagai tokoh yang mempengaruhi pola pemikiran Nurcholish Madjid bahwasannya Konsep pembaruan ini terdapat tiga hal dasar yang menjadi tolak ukur proses pembaruan Islam ke depan. Di antaranya konsep Modernisasi, Sekularisasi dan Inklusivisme. Ketiga hal tersebut menjadi pola pikir keIslaman yang membawa pada jalur pembaruan Islam di Indonesia. Berikut mengenai konsep-konsep pemikiran Nurcholish Madjid dalam pembaruan Islam:

1) Modernisasi

Untuk memberikan sebuah batasan asumsi tentang modernisasi, Nurcholish madjid berpendapat bahwa

modernisasi adalah pengertian yang identik, atau hampir identik, dengan pengertian rasionalisasi. Dan hal ini berarti proses perombakan pola berfikir dan tata kerja lama yang tidak aqliyah (rasional), dan menggantikannya dengan pola berfikir dan tata kerja baru yang aqliyah. Kegunaannya ialah untuk memperoleh daya guna dan efisiensi yang maksimal. Jadi sesuatu dapat disebut modern kalau ia bersifat rasional, ilmiah dan bersesuaian dengan hukum-hukum yang berlaku dalam alam.

Modernisasi merupakan produk perkembangan ilmu pengetahuan, maka Islam menurut Nurcholis Madjid, adalah agama yang sangat modern, bahkan terlalu modern untuk zamannya, karena Islam adalah agama yang secara sejati memiliki hubungan organik dengan ilmu pengetahuan dan mampu menjelaskan kedudukan ilmu pengetahuan tersebut dalam kerangka keimanan. Maka, kaum Muslim hendaknya yakin bahwa Islam bukan saja tidak menentang ilmu pengetahuan, tetapi justru menjadi pengembangannya dan tidak melihat perpisahan antara iman dan ilmu.

Islam merupakan agama yang pertama menyeru pada perubahan, atas apa dan bagaimana perlunya perubahan secara hanif untuk menuju pada kebenaran yang hakiki, dengan mengakui adanya perubahan menuju modernisasi sistem kehidupan. Sebagai seorang Muslim yang dengan sepenuhnya meyakini Islam sebagai *Way of Life*, yang juga

akan menganut cara berfikir Islami, menurut Nurcholis Madjid, pemaknaan terhadap substansi modernis harus berorientasi kepada nilai-nilai besar Islam. Penyebutan tahap perkembangan sejarah manusia yang sedang berlangsung sekarang ini sebagai “Zaman Modern” bukannya tanpa masalah. Masalah itu timbul karena inti dan hakikat zaman sekarang bukanlah kebaruan (“modern” berarti baru), seolah-olah sesudah tahap ini tidak ada lagi tahap berikutnya. Disamping perkataan “modern” mengisyaratkan penilaian tertentu yang cenderung positif (“modern” berarti maju dan baik).¹¹ bagi Nurcholis Madjid, menjadi modern juga berarti progresif dan dinamis, jadi tidak dapat bertahan kepada sesuatu yang telah ada, karena itu bersifat merombak tradisi-tradisi yang tidak benar, tidak rasional, tidak ilmiah, tidak sesuai dengan hukum alam.

2) Sekulerisasi bukan sekulerisme

Kemajuan suatu bangsa akan berhasil apabila masalah-masalah ditindak lanjuti setelah modernitas itu sendiri telah berhasil diwujudkan dalam bentuk kemudahan hidup dan kemakmuran, seperti di barat. Sehingga, hal ini membuat Nurcholis Madjid mengajukan pernyataan bahwa, apakah Islam relevan bagi kehidupan modern? Masalahnya adalah kaum muslim menutup dirinya dengan *skriptualisme* yang

¹¹ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2008), h. 447

amat kuat, dengan dalih menjaga kemurnian dan keaslian Kitab Suci dan secara tidak langsung hal ini menghalangi kemodernan atau pembaharuan dalam Islam. Oleh sebab itu, dialog-dialog umat muslim akan berusaha mengenali siapa yang murni dan mana yang tambahan.¹²

Sekularisasi menurutnya, ”Bukan penerapan sekularisme dan mengubah kaum muslimin menjadi sekularis.” Tetapi dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrowikannya.¹³ Dalam hal ini, yang dimaksudkan ialah setiap bentuk perkembangan yang membebaskan. Proses pembebasan ini diperlukan karena umat Islam, akibat perjalanan sejarahnya sendiri tidak sanggup lagi membedakan nilai-nilai yang disangkanya Islami. Nampaknya Nurcholish Madjid ingin menjelaskan bahwa antara sekularisasi dan sekularisme merupakan dua hal yang berbeda. “sekularisasi” cenderung kepada “proses” sedangkan “sekularisme” merupakan bentuk kepercayaan yang dianggap sebagai padanan agama atau berusaha melepaskan ketergantungan manusia dari asuhan agama.

¹² Nurcholish Madjid, *Doktrin Dan Peradaban Islam*, (Jakarta: Paramadina, 2005), h. 468-469.

¹³ Faisal Ismail, *Membongkar Kerancuan Pemikiran Nurcholish Madjid Seputar Isu Sekularisasi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Lasswell Visitama, 2010), h. 31

3) Teologi Eksklusivisme dan Inklusivisme

Teologi Eksklusivisme merupakan paham tertutup yang tidak mau menerima segala sesuatu yang datang dari luar golongannya. Penjunjung pemikiran tersebut adalah para *fundamentalisme* yang menggaris bawahi bahwa dunia Islam terus menerus mengalami kemunduran karena sebab eksternal melalui *invansi* dan serangan kultural politik dan ekonomi barat maupun internal sebagai nilai serta pengaruh dari faktor eksternal.¹⁴ Inklusivisme adalah paham terbuka yang mau menerima segala yang (positif) datang dari luar. Orang-orang Eksklusif memandang orang lain berdasarkan keturunan, agama, ras, suku, dan golongan. Mereka tidak mau menerima orang yang dianggapnya tidak cocok dengan paham atau mazhab yang dianut alirannya. Hal ini kemudian akan menciptakan sebuah tindakan tertutup yang tidak mau menerima perubahan, kemajemukan, dan pluralisme agama (dalam konteks agama).

Teologi inklusif adalah salah satu solusi yang solutif guna menghapus (*mendekonstruksi*) paham jumud dan eksklusif yang telah “membumi” dalam Islam di Indonesia. Dengan teologi inklusif ini, Islam dapat berkembang ke arah yang lebih baik dan maju.

¹⁴ Abdul Qodir, M.Ag, *Jejak Langkah Pemikiran Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2004), h. 138-140

Salah satu ciri mendasar teologi inklusif adalah memberikan formulasi bahwa Islam merupakan agama terbuka. Keterbukaan merupakan sikap yang harus dianut oleh umat Islam. Sikap ini harus diberdayakan, mengingat kondisi umat Islam dan masyarakat Indonesia sangat pluralis. Secara teologis, pluralisme bisa dipahami sebagai sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan utama Al-Qur'an, yakni membangun masyarakat adil, terbuka dan demokratis.

Kondisi sosial budaya yang majemuk selalu memerlukan titik temu dalam nilai kesamaan dari semua kelompok, sehingga keterpurukan dan keterbelakangan pemikiran yang kini mendera umat Islam di dunia dan di Indonesia khususnya, harus menjadikan teologi inklusif sebagai satu-satunya paradigma dalam menyikapi realitas. Dengan demikian, teologi inklusif adalah suatu kemanusiaan universal, paham kemajemukan masyarakat menjadi bagian amat penting dari tatanan masyarakat maju. Dalam paham itulah dipertaruhkan, antara lain sehatnya demokrasi dan keadilan. Pluralisme tidak saja mengisyaratkan adanya sikap bersedia mengakui hak kelompok lain atau ada, tetapi juga mengandung makna kesediaan berlaku adil kepada kelompok lain itu atas dasar perdamaian dan saling menghormati.

Jelas sekali bahwa bangsa kita akan memperoleh manfaat besar dalam usaha transformasi sosialnya menuju demokrasi dan keadilan jika pluralisme itu dapat ditanamkan dalam kesadaran kaum Muslim yang merupakan golongan terbesar warga negara. Secara intern, pluralisme adalah persyaratan pertama dan ukhuwah Islamiyah.¹⁵ Nurcholish Madjid tampak berupaya melakukan deskonstruksi makna Islam sebagai suatu nama agama dengan makna generik, yakni sikap pasrah dan kepatuhan terhadap hukum syari'ah.¹⁶

4) Islam Yes, Partai Islam No

Mengenai peranan umat Islam dalam bidang politik, Madjid mengetengahkan pendapat "Islam yes, partai Islam no!". Menurutnya, jika partai-partai Islam merupakan wadah ide-ide yang hendak diperjuangkan berdasarkan Islam, telah jelas bahwa ide-ide tersebut sudah tidak menarik untuk masa sekarang. Karena ide-ide tersebut sekarang sedang menjadi absolut, memfossil, dan kehilangan dinamika. Kenyataannya, partai-partai Islam yang ada gagal dalam membangun citra positif dan simpatik dan bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Misalnya semakin banyaknya umat Islam yang melakukan korupsi. Madjid tidak setuju dijadikannya Islam

¹⁵ Nur Cholis Madjid, *Doktrin Dan Peradaban Islam*, (Jakarta: Paramadina, 2005), h. 602.

¹⁶ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Dan Pluralisme Akhlaq Qur'an Meyikapi Perbedaan*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 38.

sebagai ideologi politik. Baginya yang terpenting adalah membentuk masyarakat yang sudah ada ini menjadi lebih Islami dengan pendekatan-pendekatan kultural yang bisa dilakukan.

Sebagaimana telah diketahui, partai Islam yang bermunculan setelah Indonesia merdeka. Partai-partai tersebut bertarung pada pemilu tahun 1955 dan banyak yang mengalami kegagalan. Hingga akhirnya pada masa Soeharto partai-partai tersebut difusikan dalam satu partai, yaitu PPP. Setelah terbukanya pintu reformasi, partai Islam bermunculan kembali, namun tetap kalah oleh partai nasionalis. Posisi yang lebih baik diterima oleh PKB dan PAN yang menggunakan Pancasila sebagai ideologi partainya. Meskipun di satu sisi keduanya diuntungkan dengan adanya basis massa yang besar (NU dan Muhammadiyah), namun di sisi lain penggunaan ideologi Pancasila pada dua partai tersebut menunjukkan sikap terbuka keduanya dalam menyikapi keberagaman Indonesia.

5) Pemikiran Nurcholish Madjid dalam Pendidikan Islam.

Nurcholish Madjid adalah salah satu tokoh pembaharu yang banyak mengemukakan gagasan pembaruan Islam. Beliau beranggapan perlu adanya peningkatan kualitas intelektual di kalangan muslim termasuk kaum remaja, pelajar atau santri. Tidak hanya menguasai ilmu agama saja, melainkan ikut bersaing dalam dunia modern, sebagaimana

yang pernah dicapai kaum muslimin abad pertengahan yang menguasai banyak ilmu pengetahuan dan unggul dalam banyak bidang.

Gagasan tentang pembaruan pesantren adalah bagian dari cita-cita modernisasinya. Perspektif historis menempatkan pesantren pada posisi yang cukup istimewa dalam hasanah perkembangan sosial-budaya dan agama masyarakat Indonesia. Tidak berlebihan apabila pesantren diposisikan sebagai satu elemen *determinan* dalam struktur piramida sosial masyarakat Indonesia. Adanya posisi penting yang disandang pesantren menuntutnya untuk meng-*amin*-kan peran penting dalam setiap proses pembangunan sosial baik melalui potensi pendidikan maupun pengembangan masyarakat.

Hal ini kiranya yang membuat Nurcholish Madjid begitu bersemangat mengembangkan gagasannya tentang pembaruan pesantren. Gagasannya dan pemikirannya tentang pesantren dapat dilihat dari karyanya yang berjudul "*Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*". dalam bukunya ini Nurcholish Madjid berpendapat bahwa pesantren berhak lebih baik dan lebih berguna mempertahankan fungsi pokoknya semula, yaitu sebagai tempat menyelenggarakan pendidikan agama. Namun, mungkin diperlukan suatu tinjauan kembali, sehingga ajaran-ajaran agama yang diberikan kepada setiap pribadi menjadi jawaban

yang *komprehensif* atas persoalan hidup, selain tentu saja disertai pengetahuan seperlunya tentang kewajiban-kewajiban praktik seorang muslim sehari-hari. Pelajaran-pelajaran ini kemungkinan dapat diberikan melalui beberapa cara, diantaranya:¹⁷

- (a) Mempelajari Al Quran dengan cara yang sungguh-sungguh daripada yang umumnya dilakukan oleh orang sekarang, yaitu dengan menitikberatkan pada pemahaman makna dan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Ini memerlukan kemampuan pengajaran yang lebih besar. Yaitu, pengajaran kesatuan tentang ayat-ayat atau surat-surat yang dibacanya dengan menghubungkan dengan ayat dan surat-surat lain. Pelajaran ini mungkin mirip dengan pelajaran tafsir, tapi dapat diberikan tanpa sebuah buku atau kitab tafsir melainkan cukup dengan Al Quran secara langsung.
- (b) Melalui pertolongan sebuah bahan bacaan atau buku pegangan. Penggunaan cara ini sangat bergantung pada kemampuan para pengajar dalam mengembangkannya secara lebih luas.
- (c) Memanfaatkan mata pelajaran lain untuk disisipi pandangan-pandangan keagamaan lain. Dan menanamkan kesadaran dan penghargaan yang lebih

¹⁷ Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia*, h. 327

wajar pada hasil-hasil seni budaya Islam atau untuk menumbuhkan kepekaan rohani, termasuk kepekaan rasa ketuhanan yang menjadi inti rasa keagamaan.

Nurcholish Madjid menganjurkan agar pesantren tanggap akan kebutuhan anak didiknya kelak dengan hubungannya terhadap perkembangan zaman. Untuk itu pesantren dituntut memberikan pengajaran tidak hanya tentang agama tetapi juga umum, tentunya harus sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki anak didik. Menurut Nurcholish Madjid, ilmu pengetahuan atau *science* adalah prasarat untuk mewujudkan salah satu diciptakannya alam ini, yaitu untuk manfaat manusia. Tetapi, ilmu pengetahuan itu diberikan Allah SWT melalui kegiatan manusia itu sendiri dalam usaha memahami alam raya ini. Hal ini berbed[eda dengan wahyu yang diberikan dalam bentuk pengajaran atau wahyu lewat para utusan Allah.

b. Gagasan Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Abdurahman Wahid dan orang-orang yang tertarik dengannya merupakan generasi neo-modernis Islam, termasuk tokoh-tokoh lain seperti Nurcholis Madjid, Jalaludin Rahmat, Dawam Raharjo dan Amien Rais yang menganjurkan Islamisasi atau re-Islamisasi bangsa Indonesia, Abdurahman Wahid menekankan Indonesia, pribumisasi atau kontekstualisasi Islam. Dengan cara ini, ia ingin menggabungkan nilai-nilai dan keyakinan Islam dengan kultur setempat. "Sumber Islam adalah wahyu yang mempunyai

norma-norma sendiri, karena sifatnya yang permanent. Di sisi lain budaya adalah ciptaan manusia dan oleh karena itu berkembang sesuai dengan perubahan sosial, tetapi hal ini tidak menghalangi manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya.”¹⁸

Menurut Gus Dur pribumisasi Islam adalah suatu pemahaman Islam yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dan budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi ushul al-fiqh dan qowaid al-fiqh.

Dalam proses ini Gus Dur pembauran Islam dengan budaya tidak boleh terjadi sebab berbaur berarti hilangnya sifat-sifat asli. Islam harus tetap pada sifat keIslamannya. Al-qur’an harus tetap dalam bahasa arab, terutama dalam shalat, sebab hal ini merupakan norma. Sedangkan terjemahan al-Qur’an hanyalah untuk mempermudah pemahaman bukan menggantika al-Qur’an itu sendiri.

Sebagai ulama, budayawan dan pemikir, ia banyak mengeluarkan gagasan-gagasan diantaranya membentuk kelompok warung pemikir yang bertujuan untuk melakukan

¹⁸ Jhon L, Esposito-Jhon O, Vall, *Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 261-262

terobosan-terobosan baru dalam NU, mendirikan kelompok Forum demokrasi pada tahun 1991.¹⁹

Gus Dur adalah intelektual bebas dari tradisi akademik pesantren sehingga tulisan-tulisannya cenderung bersifat reflektif, membumi, terkait dengan dunia penghayatan realitas. Dengan adanya tulisan-tulisannya menjadi bukti bahwa gerakan atau aksi Gus Dur tidak hampir teori atau tanpa visi, yang sewaktu-waktu bisa terjerumus pada fragmatisme politik.

Jika dilihat dari segi cultural Gus Dur melintasi tiga cultural :

- 1) Kultural dunia pesantren yang sangat hirarkis, penuh dengan etika yang serba formal.
- 2) Budaya Timur Tengah yang terbuka dan keras.
- 3) Lapisan budaya barat yang liberal, rasional dan sekuler.²⁰

Pilar pemikiran Abdurahman Wahid yaitu :

- 1) Keyakinan bahwa Islam harus secara aktif dan substantif ditafsirkan ulang agar tanggap terhadap tuntutan kehidupan modern.
- 2) Keyakinannya bahwa dalam konteks Indonesia, Islam tidak boleh menjadi agama negara.

¹⁹ Romdono Muslim, S.Ag, *Tokoh Muslim Indonesia*, (Jakarta : Restu Ilahi, 2005) h. 32

²⁰ K.H. Mustafa Bisri, *Beyond The Simbol*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000), cet.1 h. 36

- 3) Islam harus menjadi kekuatan yang inklusif, demokratis dan pluralis, bukan ideologi negara yang inklusif.

Legalisme Islam adalah produk masa lalu, suatu realitas sejarah yang dibolehkan yang kemudian menjadi agenda reformasi Islam kontemporer. Islam historis menyibukkan gerakan atau tradisi dari dinamisme ke formalisme legal. Karena Islam menjadi dilembagakan terutama melalui hukum. Abdurahman Wahid yakin bahwa Islam bermula sebagai suatu reformasi dinamis yang mengganggu status manusia sebagai kholifah Allah di muka bumi yang bertanggungjawab untuk menyaksikan menyebarkan dan menerapkan cara hidup yang dibenarkan Tuhan.²¹

B. Organisasi HMI Korkom UIN Walisongo Semarang

1. Sejarah HMI di Indonesia

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah organisasi yang mempunyai sejarah panjang. Dalam diskursus yang diungkapkan banyak penulis yang mengkaji organisasi Islam ini, menyatakan perlunya melihat dari sisi masa lalu dan masa sekarang. Hal ini dianggap penting sebab antara masa lalu dan masa kini, HMI mempunyai peran yang berbeda di tiap zamannya.

HMI sendiri dicetuskan Lafran Pane di Yogyakarta , dibentuk dan diresmikan pada 5 Februari 1947 atau 14 Rabiul Awal 1366. Awal mula peristiwa bersejarah ini bermula dari

²¹ Jhon L, Esposito-Jhon O, Vall, *Opcit*, h. 234-235

Lafran Pane yang mengadakan rapat dadakan tanpa undangan di STI (Sekolah tinggi Islam) yang sekarang UII (Universitas Islam Indonesia). Dalam rapat tersebut hanya dihadiri kurang dari 20 mahasiswa.²²

Lafran yang lahir di Padang Sidempuan pada 5 Feb 1922 ini memiliki latar belakang berdirinya HMI, diantaranya selain penjajahan oleh Belanda dan tuntutan kemerdekaan di tengah pergolakan nasional, HMI muncul sebagai organisasi mahasiswa pertama yang memakai label Islam. HMI berdiri karena banyaknya kesenjangan yang menimbulkan tuntutan modernisasi dan tantangan masa depan bangsa Indonesia. Gerakan mahasiswa yang lahir pada Rabu Pon pada pukul 16.00 WIB ini diyakini kelak akan menjadi wadah pengkaderan bagi calon-calon pemimpin bangsa.²³

Berikut adalah tujuan awal pembentukan HMI:²⁴

- a. Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia.
- b. Menegakkan dan mengembangkan Agama Islam

Dalam pasal 5 AD/ART HMI,²⁵ “Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdikan yang bernafaskan Islam dan

²² Amirullah, M. *Sejarah HMI dari Zaman Kemerdekaan Sampai Reformasi*. h. 1.

²³ *Ibid.*,

²⁴ Buku Pedoman Organisasi LK-I. 2012. h. 2-3.

²⁵ *Ibid*, h. 6.

bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah swt.”

Pemuda dan perguruan tinggi serta sistem kerja, tidak luput dari kehidupan mahasiswa, tidak terkecuali mahasiswa Islam. Oleh sebab itu, HMI yang merupakan integrasi potensi kemauan dari individu mahasiswa anggota, meminta pertanggung jawaban yang besar pula lebih daripada yang diduga semula. Dengan fungsi pemuda yang dipunyainya dan guna universitas yang harus diteruskan, ia tidak boleh bersunyi diri dalam laboratorium atau museum, ataupun di kamar studinya. Ia harus berkecimpung dalam segala persoalan, ia harus memberikan tenaga dan pikirannya kepada masyarakat.

HMI merupakan tempat latihan dalam persoalan seperti ini. Dalam rangka sedemikianlah usaha-usaha HMI harus dilihat usaha turut berevolusi, korektif terhadap kejadian dan pendapat, korektif terhadap golongan tua serta tidak pula boleh melupakan hubungan dengan adik-adiknya yang masih berada di sekolah menengah. Soal ini bagi mahasiswa Islam, dengan masyarakat Islam Indonesia seperti sekarang ini, sebenarnya meminta perhatian istimewa lagi. Masyarakat Islam tidak sedap dipandang mata. Madrasah-madrasah, pesantren-pesantren yang dahulu merupakan pusat pengajaran dan perkembangan Islam masih juga belum mengalami perubahan.

HMI sendiri telah menetapkan dalam pertimbangan perubahan Anggaran Dasarnya, bahwa ia (mahasiswa Islam)

“bertanggung jawab pada generasi yang lalu dan generasi yang akan datang. Ia harus korektif terhadap pergolakan masyarakat sekarang, ia harus berusaha mengumpulkan bahan selengkapnya bagi kelanjutan perjuangan dan perubahan masyarakat yang akan datang, dan ia berkewajiban mengulurkan tangan ke kalangan adik-adiknya yang sedang berada di sekolah menengah umum/tsanawiyah untuk membawa mereka ke jalan yang mendekatkan jurang antara intelek dan ulama yang di maksudkan itu. Maka dirumuskanlah tujuan HMI dalam Anggaran Dasarnya yang baru adalah “ perkembangan rohani dan jasmani dari mahasiswa Islam dalam memenuhi fungsi universitas dan kemasyarakatan”. Titik berat kepada diri, tetapi usaha untuk umat seluruhnya.²⁶

2. Gambaran HMI Korkom UIN Walisongo Semarang

a. HMI UIN Walisongo Semarang

HMI Korkom UIN Walisongo Semarang berdiri sejak kampus UIN Walisongo Semarang (yang dulu IAIN Walisongo Semarang). Kantor Komisariatnya sekarang berada di Gg Ringin Sari II, Ngaliyan. HMI Korkom merupakan tangan kanan dari HMI Cabang Semarang untuk mengkoordinir komisariat-komisariat di Fakultas UIN Walisongo. Dalam perkembangannya HMI Korkom dibagi menjadi empat Komisariat HMI di fakultas UIN Walisongo

²⁶ Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI dan Relevansinya Dengan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia* (Jakarta:Integrita Dinamika Press, 1986), h. 86-88

Semarang, yaitu Fakultas Ushuluddin (Komisariat Iqbal), Fakultas Syariah (Komisariat Syari'ah), Fakultas Dakwah (Komisariat Dakwah), Fakultas Tarbiyah (Komisariat FITK). Berdasarkan wawancara yang dilakukan, saudara Lazim selaku Ketua HMI Korkom, menjelaskan karakteristik komisariat di HMI Korkom UIN Walisongo sebagai berikut:

Setiap komisariat memiliki kultur yang berbeda sesuai komisariatnya masing-masing. Di Komisariat Iqbal, para anggota HMI sering berkecimpung dalam dunia pemikiran. Kemudian di komisariat Syariah, lebih suka demonstrasi. Begitupun juga komisariat Dakwah dan Tarbiyah. HMI Korkom menjadikan komisariat-komisariat yang terdapat di fakultas UIN Walisongo Semarang sebagai tempat bagi berlangsungnya proses pengkaderan mahasiswa di kampus. Secara kuantitas, kader HMI semakin bertambah karena posisi strategis yang berada di lingkungan kampus, namun kualitas kader sedikit menurun karena kurangnya semangat perjuangan dari para kader HMI.²⁷

Kemudian Mia Rina Koeswara menjelaskan bahwa;

Sebenarnya perkembangan HMI Korkom sangat signifikan, banyak kader yang antusias bergabung di HMI, tapi ada beberapa kendala yaitu semangat para kader, karena tidak memiliki ghirah untuk berorganisasi lagi. Itu salah satu kendala HMI Korkom. Untuk tantangan HMI, dilihat dari

²⁷ Wawancara dengan Nurul Lazim selaku Ketua HMI Korkom UIN Walisongo Semarang pada 25 Oktober 2016.

keorganisasiannya adalah tempat mahasiswa yang diajak untuk berjuang dan sama-sama menjaga nama baik dan Khittah HMI namun semangat kader itu sendiri, secara kuantitas memang banyak tapi untuk keaktifan berorganisasi masih bisa dihitung hanya beberapa. Dan HMI Korkom sendiri bertugas mengkoordinir para kader untuk membangkitkan semangat kader dan jangan sampai HMI Korkom terpuruk.

Lanjut Mia, kurangnya kesadaran para kader HMI untuk berorganisasi nampaknya menjadi masalah intern di HMI Korkom UIN Walisongo. Selain itu semangat para kader pun juga menurun, meski begitu form diskusi keIslaman tetap dijalankan oleh para kader yang masih aktif di dalamnya, tidak banyak akan tapi membuat HMI tetap hidup dalam nuansa keIslaman di antara organisasi kampus. Beberapa tahun belakangan ini, para kader hanya bersemangat hanya sampai Latihan Kader 1 dan perannya mulai merosot, kemudian itu yang menjadi tugas pada Komisariat di Fakultas dalam membina para kader tersebut. Karena kemunduran dan kemajuan HMI juga akan mempengaruhi modernisasi Islam di Indonesia. HMI berazaskan Islam, secara otomatis, pola pikir para kader HMI juga mengikuti para pemikiran pembaharu Islam misalnya Nurcholish Madjid, Gus Dur dan lainnya. Dalam hal ini peran para mahasiswa dalam membawa HMI untuk menjadi organisasi pembaharuan Islam pasti berpengaruh dalam modernisasi Islam itu sendiri dan tetap berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadist.

Manfaat HMI bagi para mahasiswa, mahasiswa tanpa organisasi akan menjadi kurang maksimal, karena dari organisasi, mahasiswa bisa belajar demokrasi dan berpolitik. Di organisasi pula dapat berkumpul dengan orang-orang baru dan membangun relasi disitu. Itu manfaat yang akan didapatkan oleh kader HMI dari berorganisasi. HMI Korkom merekrut kader tidak stagnan atau sangat dinamis sekali. Setiap ada mahasiswa baru ajaran baru, ada perekrutan yang bertujuan untuk menghimpun mahasiswa yang mau berjuang bersama HMI.

Dalam LK I, dimana kader dibina, diberikan materi-materi di HMI, seperti NDP, Konstitusi, Mission, KMO (Kepemimpinan Manajemen Organisasi) untuk menambah pengetahuan kader. Selanjutnya, LK II, ditahap ini kader akan menerima pengetahuan dari orang-orang yang memiliki keahlian dalam pemikirannya untuk memberikan pemahaman materi. Setelah LK 1 dan LK 2, kemudian *upgrading* atau pembahasan ulang dan penambahan materi. Dalam *Upgrading*, pembinaan kader dilaksanakan dengan materi pemahaman terhadap pemikiran tokoh-tokoh yang akan menambah keintelektualan para kader.²⁸

²⁸ Wawancara dengan Mia Rinakaswara selaku Ketua KOHATI, pada 12 Oktober 2016

Kemudian diungkapkan oleh Komaruddin, yang merupakan mantan ketua Komisariat Dakwah, dan masih aktif sebagai anggota HMI;

Ada juga form diskusi Centre for Democracy and Islamic Studies (CDIS) Walisongo Semarang. Lembaga kajian sekaligus LSO dari HMI Korkom Walisongo Semarang yang membahas tentang kenegaraan dan kajian Islam.

Dipandang dari organisasi lain, HMI di UIN Walisongo masih belum maksimal dalam bersaing masalah politik. Namun dalam perkembangannya masih sangat dinamis. Pada kenyataannya, mahasiswa himpunan banyak menjadi pioner-pioner dalam organisasi di kampus. Secara finansial, HMI cukup mumpuni karna mendapat dukungan dari KAHMI.²⁹

Selanjutnya ditambahkan oleh Anwar, anggota HMI Komisariat Syariah;

HMI di UIN Walisongo sendiri, ada yang namanya lembaga pengkaderan HMI, diantaranya Bina Insani, Monash Institute dan Darul Qalam. Semua kader dikontribusikan untuk HMI, disana kader diajarkan keterampilan, berdialektika, seni kepemimpinan, orasi dan lain sebagainya. Bahkan di monash bisa dibilang wajib dalam menghafalkan al-Qur'an. Karena selama ini berkuat pada pemikiran-pemikiran, teori-teori, dan cenderung ke intelektual yang liberal. Maka program itu didesain untuk memberikan inovasi baru dalam HMI dan turut perankan Hadits sebagaimana hymne HMI.

²⁹ Wawancara dengan Komaruddin, mantan Ketua HMI Komisariat Dakwah, pada 13 Oktober 2016

Pembentukan kader di HMI memang jadi organisasi kader. Dalam HMI ada lembaga seni otonom, kohati, lembaga penyalur minat bakat, lembaga dakwah, pers mahasiswa dan lain-lain. Saat ini keaktifan kader juga dipengaruhi sistem perkuliahan yang cenderung disibukkan dengan perkuliahan. Namun tradisi dalam HMI masih terus berjalan seperti diskusi, publikasi dan aksi. Itulah yang menjadi ciri khas HMI. Diharapkan tradisi intelektual tersebut jangan sampai puna walaupun mengalami kemunduran.³⁰

b. Nilai – Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI

Nilai-nilai Dasar Perjuangan adalah pedoman gerakan HMI yang hingga saat ini masih menjadi materi dalam latihan kader HMI Korkom UIN Walisongo. NDP dalam HMI yang lebih sering disingkat dengan NDP disempurnakan oleh tiga tokoh yaitu Endang Saifuddin Ashari, Sakib Mahmud dan perumusya sendiri Nurcholish Madjid. Pada ke kongres HMI ke-10 di Palembang tahun 1971 konsep dasar Islam ini dikukuhkan dengan nama “Nilai-Nilai Dasar Perjuangan”. NDP yang dijadikan landasan pedoman perjuangan kader HMI memuat tujuh tema pokok yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Dasar-Dasar Kepercayaan

Dalam bab pertama, Nilai Dasar Perjuangan menjelaskan tentang pentingnya sebuah kepercayaan bagi

³⁰ Wawancara dengan Anwar anggota HMI Komisariat Syari’ah, pada 13 Oktober 2016

manusia. Kepercayaan yang dianut harus benar dan tidak membahayakan bagi penganutnya. Kepercayaan yang dianut di negara Indonesia sangat hiruk pikuk atau beraneka ragam, sehingga manusia akan mengalami kebingungan dengan kepercayaan yang akan dianutnya.

Apabila kita membaca Al-Qur'an, problemnya itu bukan bagaimana membuat manusia percaya pada Tuhan, tetapi bagaimana membebaskan manusia dari politeisme. Sehingga kita harus memiliki sebuah kepercayaan tetapi kepercayaan yang mampu menyelamatkan kita yaitu kepercayaan kepada Allah SWT.³¹

Kemudian di dalam Al-Quran didapat keterangan lebih lanjut tentang Ketuhanan Yang maha Esa ajaran-ajaranNya yang merupakan garis besar dan jalan hidup yang mesti diikuti oleh manusia. Keesaan Tuhan dijelaskan dalam Q.S surat Al-Ikhlâs (112: 1-4)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [١] اللَّهُ الصَّمَدُ [٢] لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ [٣] وَلَمْ
يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ [٤]

Artinya: *Katakanlah: “Dialah Allah, Yang Maha Esa(1). Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu (2). Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan(3). dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia(4).”*

³¹ Lihat hasil-hasil kongres HMI XXVIII, Jakarta Timur, Depok, Jakarta Selatan, 15 Maret-15 April 2013. Hal. 160

Konsep ini menjelaskan tentang Al-tawhid (keesaan Tuhan) dan gagasan bahwa manusia adalah khalifah fil ardhi. Kedua konsep tersebut menegaskan bahwa hanya Allah SWT yang memiliki transendensi dan kebenaran mutlak. Sehingga berdampak sebagai konsekuensi diri dengan menerima prinsip monoteis.

Perkembangan pemikiran Nurcholish Madjid lebih historis dan intepretatif yang terlihat saat beliau ingin mempertemukan nilai-nilai keIslaman dan keIndonesiaan, dan upaya untuk mencari titik temu antara agama-agama dalam konteks hidup ber-Pancasila. Tujuan utama adalah untuk mengelaborasi makna Islam, Islam bersifat universal dan kosmopolitanis. Sumber universalitas Islam dapat dilihat dari perkataan Islam itu sendiri, yang berarti sikap pasrah kepada Tuhan. Dengan pengertian ini, semua agama yang benar bersifat al-Islam (dengan I kecil) yakni mengajarkan pasrah kepada Tuhan. Sehingga, menurut Nurcholish Madjid meskipun agama yang dibawa oleh nabi Musa AS itu dinamai yahudi dan nabi Isa dinamai dengan kristen , namun pada prinsip-prinsipnya bersifat al-Islam.

Namun pada kenyataannya bahwa agama yang dibawa nabi Muhammad SAW itu bernama Islam (dengan I besar) terhadap pertanyaan ini, Nurcholish Madjid mengilustrasikan berarti umat Islam harus menjadi penengah (*al-wasith*) dan saksi (*syuhada'*) diantara manusia. Umat Islam

sebagai moderator merupakan keadaan yang pernah dibuktikan dalam sejarah seperti yang tertera dalam buku sejarah peradaban Islam karya Badrim Yatim bahwasanya umat Islam menghargai minoritas Non-muslim. Sikap inklusif dan toleran ini termuat juga dalam Al-Qur'an yang mengajarkan kemajemukan beragama (*religion plurality*).³²

2) Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Kemanusiaan

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling sempurna daripada makhluk yang lain dengan diberikan akal untuk menentukan mana yang termasuk perbuatan yang baik dan perbuatan buruk. Selain itu manusia diciptakan untuk menjadi khalifah dimuka bumi. Manusia hidup di alam dunia harus melakukan sebuah pekerjaan atau amal perbuatan untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Perbuatan manusia dapat dibedakan menjadi dua yaitu perbuatan kepada Allah SWT (*habbluminnallah*) dan perbuatan kepada manusia (*habbluminnanass*). Sehingga manusia diselimuti semangat untuk mencari kebaikan, keindahan dan kebenaran. Perbuatan yang dilakukan manusia agar manusia tersebut menjadi manusia yang sejati (*insane kamil*). Perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat.

³² M. Afif Anshori, <http://integralist.blogspot.com/2015/02/pemikiran-kalam-cak-nur.html?m=1> yang diakses pada hari kamis pada tanggal 6 Januari 2016 pada pukul 23.37 WIB

3) Kemerdekaan Manusia (Ikhtiar) dan Keharusan Universal (Takdir)

Taqdir dalam Al-Qur'an adalah hukum ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan untuk mengatur pola perjalanan dan tingkah laku alam ciptaannya khususnya alam material. Contohnya pola peredaran bulan mengelilingi bumi yang kemudian manusia menjadikannya sebagai dasar perhitungan waktu baik selama 1 bulan, dan 1 tahun.

Untuk menentukan kesuksesan dalam kehidupan duniawi manusia dituntut untuk memahami hukum ketetapan Allah bagi lingkungan sekelilingannya yaitu alam. Implikasi pemahaman semacam ini (pemahaman lingkungan material hidup didunia) menghasilkan ilmu pengetahuan yang dapat menjadi teknologi modern.

Namun menurut Nurcholish Madjid, hidup didunia tidak hanya cukup dengan dengan ilmu pengetahuan saja, karena ilmu pengetahuan bukanlah jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan yang langgeng. Namun manusia juga harus mengembalikan semuanya kepada Allah (pasrah) agar tidak ada rasa khawatir.

Segala sesuatu yang terjadi (sudah terjadi) maka itu adalah Takdir Allah, namun apabila peristiwa tersebut belum terjadi maka yang harus dilakukan manusia adalah ikhtiar. Selanjutnya berkenaan dengan Sunnatullah, Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa Sunnatullah meliputi ajaran-ajaran

moral atau agama yang disampaikan Allah kepada nabi Muhammad. Karena itu manusia harus memahami dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan itu demi keselamatan dan kebahagiaan yang lebih utuh.

Sunnatullah bersifat menyeluruh, yang menguasai semua aspek hidup social manusia sepanjang sejarah, tidaklah diterangkan Allah, sebab otak manusia tidak akan muat untuk sekaligus pemahaman. Oleh karena itu Sunnatullah itu terwujud nyata dalam perjalanan sejarah manusia maka terdapat kemungkinan bagi manusia untuk melengkapi pengetahuannya tentang hukum ketentuan Tuhan yang didapatnya secara deduktif dari ajaran agama itu dengan memerhatikan dan memahami serta memacu manusia untuk menggunakan segenap potensi akal budinya dalam memahami hukum-hukum Tuhan yang ada di jagad raya ini (*kawniyah*).³³

4) Ketuhanan Yang Maha Esa dan Perikemanusiaan

Tujuan manusia adalah untuk mencari ridho Allah SWT. Karena Dia-Lah yang mengajarkan manusia dalam kebenaran dan tempat memohon segala sesuatu. Karena kemutlakannya, Tuhan bukan saja tujuan segala kebenaran namun kepada Allah SWT. Sesuai yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali Imron ayat 60,

³³ Hasil diskusi (yang disampaikan oleh Abdul Ghofur selaku Kabid PPPA HMI Korkom UIN Walisongo, Cab. Semarang) pada 20 Desember 2016

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ [٣:٦٠]

Artinya: *“(Apa yang telah Kami ceritakan itu), itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.”*

Dari pernyataan diatas sebagai makhluk manusia harus mempunyai keimanan dalam pengabdianya kepada Allah SWT. Orang tersebut dinamakan Muslim. Muslim muslim harus mampu mengeksplor dirinya lebih untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan memajukan peradaban umat Islam seperti zaman Rasulullah dan para sahabat.

Hakikat hidup seorang manusia untuk mendapat ridho dari Allah SWT adalah terletak pada amal perbuatannya atau tindakannya. Orang yang mencintai Allah akan selalu melakukan perbuatan yang baik namun sebaliknya orang yang tidak mencintai Allah dia akan selalu melakukan hal- hal negative yang akan berdampak pada keruntuhan peradaban Islam. Salah satu perbuatan yang merusak akhlak manusia adalah perbuatan “syirik”. Maksudnya orang menghambakan diri kepada Tuhan yang lain. Dan sifat ini sangat bertentangan dengan sikap kemanusiaan. Pada dasarnya sikap kemanusiaan adalah sikap yang adil yang mampu menempatkan sesuatu pada posisinya secara wajar. Sifat kemanusiaan selalu mempunyai itikad baik untuk melakukan sesuatu kebaikan yang memancarkan sifat ketuhanan seperti yang sudah

dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
[١٦:٩٠]

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”³⁴

5) Individu dan Masyarakat

Manusia hidup dalam suatu bentuk hubungan tertentu dengan dunia sekitarnya, sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan kemanusiaannya dengan baik tanpa berada ditengah sesamanya dalam bentuk-bentuk hubungan tertentu. Manusia yang bergaul di tengah masyarakat akan banyak menimbulkan perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Namun perbedaan tersebut untuk kebaikan diri pribadi. Pemenuhan bidang kegiatan guna kepentingan masyarakat adalah suatu keharusan, walaupun hanya beberapa orang saja. Peningkatan manusia tidak dapat terjadi tanpa memberikan orang lain keleluasaan untuk mengembangkan kecakapannya melalui aktifitas kerja yang

³⁴ Lihat hasil-hasil kongres HMI XXVIII, Jakarta Timur, Depok, Jakarta Selatan, 15 Maret-15 April 2015. Hal. 170-171

sesuai dengan kecenderungannya atau bakatnya. Sehingga kebebasan individu dapat dibatasi dengan kebebasan orang lain.

Dalam kehidupan masyarakat, manusia tidak dapat hidup sendiri, mereka harus saling tolong menolong di dalam masyarakat. Hubungan kepada masyarakat yang dijalin dengan keikhlasan maka akan mendapatkan pahala dari Tuhan, sedangkan apabila hubungan tersebut sudah tidak ada ikatan ikhlas maka akan mendapatkan azab Tuhan. Manusia akan merasakan akibat amal perbuatannya sesuai dengan ikhtiarnya. Semakin orang bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab dengan kesadaran maka akan membentuk masyarakat yang tentram dan mendapat ridhonya.

Manusia yang mengenali dirinya sebagai makhluk yang nilai dan martabatnya dengan sepenuhnya, jika ia mempunyai kebebasan tidak akan mengatur dirinya saja tetapi juga akan memperbaiki kehidupan sesama manusia dalam lingkungan masyarakat. Dasar hidup gotong royong ialah keistimewaan dan kecintaan sesama manusia dalam pengakuan akan adanya persamaan dan kehormatan kepada orang lain.

6) Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi

Untuk membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera tidak dapat dibentuk oleh satu orang saja melainkan dari banyak orang. Apabila individu mementingkan egonya maka

akan terjadi sikap anarki atau kekacauan. Yang akan menghancurkan masyarakat itu sendiri dan tidak akan terciptanya keadilan di masyarakat. Lalu siapakan yang akan menegakkan keadilan dimasyarakat? Sudah tentu masyarakat itu sendiri. Namun dalam prakteknya diperlukan seorang pemimpin yang memiliki rasa kemanusiaan yan tinggi sebagai pancaran dari kecintaan yang tak terbatas pada Tuhan. Sehingga pemimpin tersebut akan bersikap demokratis , karena berasal dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat untuk menjalankan kebijaksanaan atas persetujuan rakyat yang berdasarkan musyawarah dimana keadilan dan martabat kemanusiaan tidak terganggu.

Menegakkan keadilan mencakup penguasaan atas keinginan-keinginan dan kepentingan pribadi yang tak mengenal batas (hawa nafsu). Kewajiban dari Negara sendiri dan kekuatan social untuk menjunjung tinggi prinsip kegotongroyongan dan kecintaan sesama manusia. Apabila kita jujur mampu menegakkan keadilan terhadap diri sendiri, masyarakat dan pemerintah maka perilaku tersebut merupakan ketaatan kepada Tuhan.

Menegakkan keadilan akan berpengaruh terhadap keadilan ekonomi masyarakat. Apabila masyarakat tidak membatasi batas-batasnya maka akan ada pertentangan golongan yang didorong dengan sikap tidakselarasan antara

pertumbuhan kekuatan produksi dan pengumpulan kekayaan oleh golongan kecil dengan hak istimewa dipihak lain.

7) Kemanusiaan dan Ilmu Pengetahuan

Inti dari pada kemanusiaan yang suci adalah Iman dan kerja kemanusiaan atau Amal Saleh. Iman dalam pengertian kepercayaan akan adanya kebenaran mutlak yaitu Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadikanya satu-satunya tujuan hidup dan tempat pengabdian diri yang terakhir dan mutlak. Sikap itu menimbulkan kecintaan tak terbatas pada kebenaran, kesucian dan kebaikan yang menyatakan dirinya dalam sikap pri kemanusiaan. Sikap perikemanusiaan menghasilkan amal saleh, artinya amal yang bersesuaian dengan dan meningkatkan kemanusiaan. Sebaik-baiknya manusia ialah yang berguna untuk sesamanya. Oleh karena itu manusia berikhtiar dan merdeka, ialah yang bergerak. Gerakan itu tidak lain dari pada gerak maju kedepan (progresif). Dia adalah dinamis, tidak statis. Dia bukanlah seorang tradisional, apalagi reaksioner. Dia menghendaki perubahan terus menerus sejalan dengan arah menuju kebenaran mutlak. Dia senantiasa mencari kebenaran-kebenaran selama perjalanan hidupnya.

Kebebenaran-kebenaran itu menyatakan dirinya dan ditemukan di dalam alam dari sejarah umat manusia. Ilmu pengetahuan adalah alat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran-kebenaran dalam hidupnya, sekalipun

relatif namun kebenaran-kebenaran merupakan tonggak sejarah yang mesti dilalui dalam perjalanan sejarah menuju kebenaran mutlak. Dan keyakinan adalah kebenaran mutlak itu sendiri pada suatu saat dapat dicapai oleh manusia, yaitu ketika mereka telah memahami benar seluruh alam dan sejarahnya sendiri. Jadi ilmu pengetahuan adalah persyaratan dari amal soleh. Hanya mereka yang dibimbing oleh ilmu pengetahuan dapat berjalan diatas kebenaran-kebenaran, yang menyampaikan kepada kepatuhan tanpa reserve kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan iman dan kebenaran ilmu pengetahuan manusia mencapai puncak kemanusiaan yang tertinggi sesuai yang tertulis dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Mujadillah ayat 11,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
 يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
 مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
 [١١:٥٨]

Artinya: *Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Manusia harus menguasai alam dan masyarakat guna dapat mengarahkannya kepada yang lebih baik. Penguasaan dan kemudian pengarahan itu tidak mungkin dilaksanakan tanpa pengetahuan tentang hukum-hukumnya agar dapat menguasai dan menggunakannya bagi kemanusiaan.

Cara-cara perbaikan hidup sehingga terus-menerus maju kearah yang lebih baik sesuai dengan fitrah adalah masalah pengalaman. Pengalaman ini harus ditarik dari masa lampau, untuk dapat mengerti masa sekarang dan memperhitungkan masa yang akan datang. Menguasai dan mengarahkan masyarakat ialah mengganti kaidah-kaidah umumnya dan membimbingnya kearah kemajuan dan kebaikan.³⁵

- c. Perkaderan HMI Korkom UIN Walisongo Semarang
 - 1) Fungsi Pengkaderan HMI

Tujuan sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi agar dapat melaksanakan usaha-usaha oleh organisasi tersebut secara teratur dan searah. Tujuan suatu organisasi dipengaruhi oleh dasar motivasi pembentukannya, latar belakangnya serta fungsi dan statusnya. Tujuan HMI mempunyai nilai developmental, karena di dalam rumusan tujuan HMI

³⁵ Solichin, *HMI Candradimuka Mahasiswa*, (Jakarta: Sinergi Persadatama Foundation, 2010) hal. 242

yang pertama³⁶ dapat berfungsi sebagai tolak ukur sampai seberapa jauh HMI dapat memberikan partisipasi dalam membela, mempertahankan, membina, membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemantapan fungsi perkaderan HMI tersebut ditambah dengan satu kenyataan bahwa Bangsa Indonesia sangat kekurangan akan tenaga intelektual yang memiliki keseimbangan hidup yang padu antara pemenuhan tugas dunia dan ukhrawi, ilmu dan iman, individu dan masyarakat, serta tuntutan peranan kaum intelektual yang kian besar dimasa mendatang.

Pada hakikatnya HMI bukanlah organisasi massa dalam pengertian fisik dan kuantitatif, tetapi sebaliknya HMI adalah lembaga pengabdian dan pengemban ide secara kualitatif harus mendidik, memimpin anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan dengan cara-cara perjuangan yang benar dan efektif. Kemudian pasca kemerdekaan Indonesia, timbul tuntutan agar cita-cita HMI dapat direalisasikan dan diwujudkan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut didasari dengan niat mewujudkan

³⁶ Mempertahankan kemerdekaan dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia dari intervensi kolonialisme internasional : Modul LK1 Cab. Semarang, h.13

kehidupan masyarakat adil makmur. Maka sejak saat itulah perlunya pembangunan nasional.

Untuk melakukan pembangunan nasional, diperlukan adanya ilmu pengetahuan. Pemimpin Nasional yang dibutuhkan adalah negarawan yang “problem solving” yaitu tipe “administrator”.³⁷ Selain ilmu pengetahuan, diperlukan juga adanya akhlak dan Iman sehingga mereka mampu melaksanakan tugas kemanusiaan sebagai bentuk amal saleh. Manusia yang demikian mempunyai garansi objektif untuk mengantarkan bangsa Indonesia kedalam suatu kehidupan yang sejahtera, adil makmur serta bahagia.

Suatu masyarakat atau kehidupan yang adil dan makmur hanya akan terbina dan terwujud dalam suatu pembaruan dan pembangunan terus menerus oleh manusia-manusia yang berilmu dan berperikemanusiaan, dengan mengembangkan nilai-nilai kepribadian bangsa. Disitulah letak peran HMI sebagai organisasi yang berfungsi sebagai organisasi perkaderan yang mencetak *otuput* sebagai motor penggerak pembangunan guna menciptakan masyarakat adil makmur dan sejahtera.

Suatu hal yang paling penting dicatat adalah, HMI yang baik adalah HMI yang tidak hanya berguna bagi ummat Islam tetapi juga bagi bangsa dan masyarakat

³⁷ *Ibid.*, h. 67

Indonesia secara keseluruhan. Ia, anak kandung umat Islam, sekaligus anak kandung bangsa yang tercinta ini.³⁸

2) Landasan Pengkaderan HMI

Landasan pengkaderan merupakan pijakan pokok yang dijadikan sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam proses pengkaderan HMI. Menurut Ichwan, selaku pemateri pengkaderan di HMI Korkom UIN Walisongo, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan perkaderan, komisariat-komisariat HMI bertitik tolak pada lima landasan yang diambil dari hasil kongres XXVII sebagai berikut:³⁹

a) Landasan teologis

Dalam landasan ini konsepsi syahadat akan ditafsirkan sebagai monotheisme radikal. Kalimat syahadat pertama berisi negasi yang meniadakan tuhan selain Allah. Kalimat kedua berisi penegasan atas dzat yang Maha tunggal yaitu Allah SWT. Dalam menjiwai konsepsi tersebut maka perjuangan manusia diarahkan untuk melawan segala sesuatu yang membelenggu manusia dari yang dituhankan selain Allah.

³⁸ Agus Salim Sitompul, *HMI Mengayuh di Antara Cita dan Kritik*, Yogyakarta : Aditya Media, 1997, h. 305

³⁹ Wawancara terbuka dengan Ichwan, selaku pemateri pengkaderan di HMI Korkom UIN Walisongo Semarang pada 26 September 2016

Dalam menjalani fungsi kekhalfahannya maka internalisasi sifat Allah dalam diri manusia harus menjadi sumber inspirasi. Dalam konteks ini, tauhid menjadi aspek progresif dalam menyikapi persoalan mendasar manusia. Karena Allah adalah pemelihara kaum yang lemah (*rabbul mustadh'afin*) maka meneladani sifat Allah juga berarti harus berpihak kepada kaum mustadh'afin. Pemahaman ini akan mengarahkan pada pandangan bahwa ketauhidan adalah nilai-nilai yang bersifat transformatif, membebaskan, berpihak dan bersifat revolusioner. Spirit inilah yang harus menjadi paradigma dalam sistem perkaderan HMI.

b) Landasan ideologis

Islam sebagai landasan nilai yang secara sadar dipilih untuk menjawab kebutuhan kebutuhan serta masalah-masalah yang terjadi dalam suatu komunitas masyarakat. Ideologi Islam senantiasa mengilhami dan memimpin serta mengorganisir perjuangan, perlawanan dan pengorbanan yang luar biasa untuk melawan semua status quo, belenggu dan penindasan terhadap ummat manusia Dalam sejarah Islam Nabi Muhammad telah memperkenalkan Ideologi dan mengubahnya menjadi keyakinan, serta memimpin

rakyat kebanyakan dalam praktek praktek mereka melawan kaum penindas.

Cita cita ideal Islam adalah, adanya transformasi terhadap ajaran ajaran dasar Islam tentang persaudaraan universal (*Universal Brotherhood*), kesetaraan (*Equality*), keadilan sosial (*Social Justice*), dan keadilan ekonomi (*Economical Justice*) sebuah cita cita yang memiliki aspek liberatif, sehingga dalam usaha untuk mewujudkannya membutuhkan keyakinan, tanggung jawab, keterlibatan dan komitmen, karena pada dasarnya sebuah ideologi menuntut penganutnya bersikap setia (*Commifted*).

c) Landasan konstitusi

Demi mewujudkan cita-cita HMI di masa depan, maka HMI mempertegas posisinya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara demi melaksanakan tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia. Penegasan posisi HMI termaktub dalam konstitusi HMI anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) HMI yang merupakan pedoman HMI yaitu : dalam pasal tiga (3) tentang azas dijelaskan bahwa HMI adalah organsisasi berazaskan Islam dan bersumber kepada Alqur'an dan As-Sunnah. Penegasan ini memberikan penjelasan bahwa HMI senantiasa mengemban tugas dan tanggung

jawab dengan semangat keIslaman dengan tidak mengesampingkan semangat kebangsaan. Pasal 6 AD HMI menjelaskan tentang independensi HMI, bahwa HMI adalah organisasi mahasiswa yang independen, berstatus sebagai organisasi mahasiswa (pasal 7 AD HMI), memiliki fungsi sebagai organisasi kader (pasal 8 AD HMI) serta berperan sebagai organisasi perjuangan (pasal 9 AD HMI).

d) Landasan Historis

Secara sosiologis dan historis, kelahiran HMI tidak terlepas dari permasalahan bangsa yang di dalamnya mencakup umat Islam sebagai satu kesatuan dinamis dari bangsa Indonesia yang sedang mempertahankan kemerdekaan yang baru diplokanirkan.

Melihat komitmen HMI pada wawasan sosiologis dan historis berdirinya pada tahun 1947 masa itu, yang juga telah dibuktikan dalam sejarah perkembangannya, maka pada hakikatnya segala bentuk pembinaan kader HMI harus pula tetap diarahkan dalam rangka pembentukan pribadi kader yang sadar akan keberadaannya sebagai pribadi muslim, khalifah dimuka bumi dan pada saat yang sama kader tersebut harus menyadari pula keberadannya sebagai kader bangsa Indonesia yang

bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita bangsa ke depan.

e) Landasan Sosio-Kultural

Keberhasilan Islam yang secara dramatik telah berhasil menguasai hampir seluruh kepulauan nusantara, tentunya hal tersebut disebabkan oleh karena agama Islam memiliki nilai-nilai universal yang tidak mengenal batas-batas sosio-kultural, geografis dan etnis manusia. Sifat Islam ini termanifestasikan dalam cara penyebaran Islam oleh para pedagang dan para wali dengan pendekatan sosio-kultural yang cukup persuasif.

Karena mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama Islam, maka kultur Islam telah menjadi realitas sekaligus memperoleh legitimasi sosial dari bangsa Indonesia yang pluralistik. Dengan demikian wacana kebangsaan di seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya Indonesia meniscayakan transformasi total nilai-nilai universal Islam menuju cita-cita mewujudkan peradaban Islam

3) Proses Perkaderan

Proses perkaderan di HMI melalui berbagai tahap. Ada tahap formal maupun tahap informal yang mampu mencetak manusia yang progresif.

a) Training Formal

Training formal adalah training berjenjang yang diikuti oleh anggota dan setiap jenjang merupakan prasyarat untuk mengikuti jenjang berikutnya. Dalam training formal HMI terdiri dari 3 training, yaitu Latihan kader I (basic training) bertujuan “terbinanya kepribadian muslim yang berkualitas akademis, sadar akan fungsi dan perannya dalam berorganisasi serta hak dan kewajibannya sebagai kader umat dan kader bangsa”, Latihan kader II (Intermediate Training) bertujuan “ terbinanya kader HMI yang mempunyai kemampuan intelektual dan mampu mengelola organisasi serta berjuang untuk meneruskan dan mengembangkan misi HMI”, Latihan Kader III (Advance Training) bertujuan untuk “terbinanya kader pemimpin yang mampu menterjemahkan dan mentransformasikan pemikiran konseptual secara profesional dalam gerak perubahan sosial.

b) Training In-Formal

Training informal adalah training yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan profesionalisme kepemimpinan serta keorganisasian anggota. Training ini terdiri dari PUSDIKLAT Pimpinan HMI, Senior Course, Latihan khusus kohati, Up-Grading kepengurusan, Training senior course Up-grading kepengurusan, Up-grading kesekretariatan, pelatihan

kekaryaannya. Training ini bertujuan “terbinanya kader yang memiliki skill dan profesionalisme dalam bidang manajerial, keinstrukturan, keorganisasian, kepemimpinan dan kewirausahaan dan profesionalisme lainnya”

Selain itu kultur kehidupan di HMI, khususnya komisariat adalah adanya kajian-kajian diskusi, diskusi informal, forum-forum ilmiah dan kegiatan lainnya yang membangun wacana kritis bagi kader.

Tujuan training formal maupun informal ini bertujuan mewujudkan cita-cita organisasi sehingga dalam proses perkaderan menghasilkan output yang berkualitas insan cita yang mampu mengemban misi bangsa Indonesia.

3. Pola Gerakan HMI Korkom UIN Walisongo Semarang

Dalam khitahnya HMI menggariskan ada tiga wacana yang dikembangkan, antara lain; wacana keIslaman, wacana kemahasiswaan dan wacana keindonesiaan. *Pertama*, wacana keIslaman, bagaimana wacana keIslaman dikembangkan sebagai semangat atau spirit bagi organisasi dalam menegakkan kebenaran Islam yang *rahmatan lil'alam* mampu diimplementasikan dalam diri setiap kader HMI atau hanya sekedar pemanis mulut dalam bertutur kata tanpa menjadi laku yang konkrit dalam kehidupan social masyarakat. Ada sesuatu yang telah hilang dari wacana keIslaman, yaitu antara pengembangan nalar dan dzikir dalam pertumbuhannya kurang seimbang pada hal kajian Nilai Dasar Perjuangan (NDP) sebagai

nilai identitas kader telah dijelaskan bahwa kerja manusia adalah keterpaduan antara iman, ilmu dan amal secara totalitas dalam keseimbangan peran kemanusiaannya. Integritas seorang kader sama saja dengan integritas siapa saja berpangkal dari kesadarannya tentang apa makna hidup dan tujuan hidupnya.

Kedua, wacana kemahasiswaan, HMI yang basik masanya di perguruan tinggi, maka hubungan yang harmonis dengan kampus merupakan keharusan mutlak, agar HMI tidak ditinggal wadah dan sumber kadernya. Dalam konteks ini HMI harus mampu menangkap dan menganalisa akar masalah dari pendidikan tinggi, sehingga mampu memberikan masukan yang berarti bagi pendidikan di Indonesia yang lebih berkualitas. HMI mempunyai tugas berat dalam mengembangkan gerakan mahasiswa yang lebih konstruktif untuk menatap bangsa Indonesia kontemporer lebih canggih dan mempunyai berbagai keunggulan kumulatif di tengah kemajemukan.

Ketiga, wacana keindonesiaan, sepak terjang HMI dalam wacana ini telah teruji dengan para politisi dan kadernya yang terserap dalam struktur birokrasi Negara, demikian hingga konteks ini sering menimbulkan berbagai kritik yang pedas terhadap kemandirian HMI.

Ketua HMI Korkom UIN Walisongo mengatakan bahwa:

“dari ketiga wacana tersebut, HMI Korkom UIN Walisongo membentuk beberapa lembaga dalam rangka memudahkan realisasi usaha mencapai tujuan HMI maka dibentuk Korps-HMI-Wati, Lembaga Pengembangan

Profesi, Badan Pengelola Latihan dan Badan Penelitian Pengembangan.⁴⁰

a. Pemikiran KeIslaman dalam HMI

Untuk melakukan pembaharuan dalam Islam, maka pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan umat Islam akan agamanya harus ditingkatkan, sehingga dapat mengetahui dan memahami ajaran Islam secara benar dan utuh. Kebenaran Islam memiliki jaminan kesempurnaannya sebagai peraturan untuk kehidupan yang dapat menghantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Tugas suci umat Islam dalah mengajak umat manusia kepada kebenaran Illahi dan kewajiban umat Islam adalah menciptakan masyarakat adil makmur material dan spiritual. Dengan adanya gagasan pembaharuan pemikiran keIslaman, diharapkan kesenjangan dan kejumudan pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalpat dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Kebekuan pemikiran umat Islam telah membawa pada arti agama yang kaku dan sempit, tidak lebih dari agama yang hanya melakukan peribadatan. Al-Qur'an hanya dijadikan sebatas bahan bacaan, Islam tidak ditempatkan sebagai agama universal. Gagasan

⁴⁰ Wawancara dengan ketua HMI Korkom UIN Walisongo Semarang pada 20 Desember 2016

pembaharuan pemikiran Islam ini pun hendaknya dapat menyadarkan umat Islam yang terlena dengan kebesaran dan kejayaan masa lalu.

Wawasan keIslaman terlihat dari tujuan HMI yang kedua *Menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam* yang mengandung tiga pemikiran;

- (1) pengamalan ajaran Islam secara utuh dan benar sesuai dengan tuntutan al-Quran dan al-Hadis
- (2) keharusan pembaharuan pemikiran dalam Islam
- (3) pelaksanaan dan pengembangan dakwah Islam.

b. Keilmuan dan Intelektualitas HMI

Ada tujuh materi pokok yang merupakan kunci mengenai hakikat dan tujuan ilmu menurut pandangan Islam dan menunjukkan hakikat asasi akan kesinambungan kesalingtergantungan antara konsep yang satu dengan yang lain yang dirumuskan oleh Syed Naquib al-Attas. Konsep itu adalah :

1. Konsep Agama (Din al-Islami)
2. Konsep manusia (al-insan)
3. Konsep ilmu (al-ilm dan al-ma'rifat)
4. Konsep kebijaksanaan (al-hikmah)
5. Konsep keadilan (al-adl)
6. Konsep perbuatan benar (amal sebagai adab)
7. Konsep universitas

Secara praktis, yang pertama adalah mengenai tujuan mencari ilmu dan keterlibatan dalam proses pendidikan; yang kedua mengenai ruang lingkungannya; yang ketiga mengenai kandungan; yang keempat mengenai kriteria dalam hubungannya dengan yang ketiga; yang kelima mengenai pengaturannya dalam hubungannya dengan yang keempat; yang keenam mengenai kaidah (method) dalam hubungannya yang pertama hingga yang kelima; yang ketujuh mengenai bentuk pelaksanaan dalam hubungannya dengan semua yang terdahulu.⁴¹

Tujuh konsep tersebut akan disesuaikan dengan keperluan dan kondisi masing-masing lembaga. Kuliah nonformal semacam ini, dapat menjadi sebuah pola yang baku yang dapat dilakukan HMI disetiap kampus. Bahkan sangat memungkinkan untuk dilaksanakan secara profesional. Program ini ialah bentuk program nyata yang dapat dirasakan langsung oleh mahasiswa Islam disetiap kampus. Peningkatan kualitas keagamaan mahasiswa tentu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas bangsa. Jika banyak mahasiswa memiliki kualitas spiritual yang memadai, pada masa yang akan datang, kualitas peradaban Indonesiapun akan semakin baik.

⁴¹ Aulia Kosasih, *Dari HMI untuk Bangsa*, Jakarta: Aelaide Publishing, 2010, hal : 36

Sebagai mahasiswa yang menjadi tombak perjuangan bangsa, intelektualitas menjadi hal pokok yang menjadi kualitas diri dalam daya guna untuk bangsa, begitu juga dengan para aktivis HMI khususnya di UIN Walisongo Semarang, selalu mengedepankan intelektual dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh komisariat-komisariat. Dalam lembaga-lembaga yang ada dalam HMI Korkom UIN Walisongo, kegiatan yang masih aktif dan berjalan sampai sekarang diantaranya:

1) Bina Insani

Tujuan dari anggota HMI dalam kegiatan ini adalah pemanfaatan diri untuk masyarakat dengan diadakannya TPQ dan bimbingan belajar bagi anak-anak disekitar kantor komisariat yang dikelola oleh para anggota HMI di komisariat-komisariat UIN Walisongo.

2) CDIS (Central of Democracy and Islamic Studies)

Kegiatan yang dilakukan CDIS diantaranya musyawarah dan diskusi keagamaan. CDIS juga menekankan kegiatan tersebut secara bebas dan terbuka. Semua pendapat dari para anggota seputar keilmuan, politik kenegaraan dan sosial didiskusikan dalam kegiatan CDIS.

3) Kajian bahasa

Kajian ini juga dikelola oleh lembaga dalam HMI dengan mengkaji beberapa bahasa diantaranya bahasa Inggris dan bahasa Arab.

4) Tahfidz Qur'an

Hampir sebagian dari anggota HMI ada dalam kegiatan hafalan Qur'an yang dikelola oleh Monash Institut, yang pendirinya juga dari alumni HMI.

c. Peran HMI dalam Sosial Politik

Karakteristik khas pola gerakan HMI sejak awal berdirinya adalah tidak memisahkan gerakan politik dengan gerakan keagamaan. Berpolitik bagi HMI adalah suatu keharusan, sebab untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan HMI haruslah dilakukan secara politis. Hal ini dikuatkan pula oleh pendiri HMI Lafran Pane, bahwa bidang politik tidak akan mungkin dipisahkan dari HMI, sebab itu merupakan watak asli HMI semenjak lahir.⁴² Namun hal itu bukan berarti HMI menjadi organisasi politik, sebab HMI lahir sebagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan teologisnya, kampus sebagai wahana aktivitasnya, mahasiswa Islam sebagai anggotanya. *Background* kampus dan idealisme mahasiswa merupakan

⁴²Hasanuddin M. Saleh, *HMI dan Rekayasa Azas Tunggal Pancasila*. Yogyakarta : Kelompok Studi Lingkaran, 1996), h. 36

faktor penyebab HMI senantiasa berpartisipasi aktif dalam merespon problematika yang dihadapi umat dan bangsa, jadi wajar jika HMI tetap memainkan peran politiknya dalam kancah bangsa ini. Selain itu, argumentasi lain dikemukakan oleh Rusli Karim dalam tulisannya;

“Walaupun HMI bukan organisasi politik, tetapi ia peka dengan permasalahan politik. Bahkan kadang-kadang karena keterlibatannya yang sangat tinggi dalam aktivitas politik ia dituduh sebagai kelompok penekan (pressure group)”⁴³.

Lazim menjelaskan, bahwa:

Dalam politik, peran HMI ditunjukkan dengan ikut serta para anggota HMI Korkom UIN Walisongo dengan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat terhadap pemerintah yaitu aksi demonstrasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengkritisi gerakan pemerintah dan mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, turut serta memperingati hari-hari nasional seperti Hari Kesaktian Pancasila. Begitu juga dengan sosial, para aktivis HMI juga menggalang dana untuk korban-korban musibah bencana alam dan bekerja sama dengan organisasi lain dalam atau diluar UIN Walisongo Semarang.⁴⁴

Watak khas pola gerakan politik HMI ini yang terinternalisasi sejak kelahirannya ini menjadikan HMI senantiasa bersikap lebih berhati-hati dalam melakukan

⁴³ M. Rusli Karim.. *HMI MPO ; Dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia* (Bandung : Mizan, 1997), h. 26

⁴⁴ Wawancara dengan ketua HMI Korkom UIN Walisongo Semarang pada 20 Desember 2016

aktivitas organisasinya, sehingga kehati-hatian inilah yang melahirkan sikap moderat dalam aktivitas politik HMI. Lahirnya sikap moderat ini sebagai konsekuensi logis dari kebijakan HMI memposisikan dirinya harus senantiasa berada diantara berbagai kekuatan kepentingan agar HMI bisa lebih leluasa untuk melakukan respon serta kritisismenya dalam mencari alternatif dan solusi dari problematika yang terjadi disekitarnya. Namun sebagai konsekuensi logis pula bagi HMI, dengan sikap moderat dalam aktivitas politiknya ini, munculnya kecenderungan sikap akomodatif⁴⁵ dan kompromis dengan kekuatan kepentingan tertentu, dalam hal ini penguasa.

Sikap politik HMI dalam proses kesejarahannya memperlihatkan dinamika yang cukup menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama kaitannya antara sikap politik HMI dengan kondisi sosial politik yang terjadi pada masa tertentu. Sedikitnya ada dua faktor yang mempengaruhi pola gerakan HMI, yaitu;

- 1) Faktor internal, faktor ini berupa corak pemikiran keIslaman dan keindonesiaan yang dipahami HMI

⁴⁵ Mengenai sikap akomodasionis HMI ini, Lafran Pane (pendiri HMI) dalam majalah *Forum Pemuda* no. 41, Mei 1983, mengatakan bahwa sikap akomodasionis HMI ini sudah merupakan kodrat HMI dalam aktivitas organisasinya. Lihat Rusli Karim.. *HMI MPO ; Dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia* (Bandung : Mizan, 1997), h. 26

dan kultur gerakan HMI yang dibentuk sejak kelahirannya.

- 2) Faktor eksternal. HMI yang menegaskan dirinya sebagai organisasi berbasis Islam dengan ajaran Islam sebagai landasan nilai dalam gerakannya, tentunya tidak bisa dilepaskan dari komunitas Islam. HMI pun menegaskan dirinya sebagai anak kandung umat Islam yang senantiasa akan berjuang bersama-sama umat dan ditengah-tengah umat dalam memperjuangkan terciptanya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT (*baladatan toyyibatun warabbun ghafur*).

Oleh karena itu, pola gerakan HMI akan banyak sekali dipengaruhi oleh kondisi sosio-aspiratif umat Islam. Karena sosio-aspiratif ini pasti berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman, maka pola gerakan HMI dalam konteks ini pun akan berubah sesuai dengan kondisi sosio - aspiratif umat Islam.